

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan<sup>1</sup>. Dengan demikian, pendidikan merupakan hal yang penting dan dianggap urgen dalam kehidupan manusia. Dan pendidikan berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut<sup>2</sup>. Pendidikan pula yang merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, material dan spiritual.

Pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah dirumuskan pada pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran yang diatur dengan undang-undang<sup>3</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang di atas jelaslah bahwa tiap warga negara atau setiap individu berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Sedangkan yang

---

<sup>1</sup>M. Ngalim Poerwanto, *Ilmu Pendidikan dan Praktis*, (Bandung: Remaja Roesda Karya, 2000), cet. ke-12, h.10

<sup>2</sup>Daulay Haidar Putra, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media ,2004), h. 9

<sup>3</sup> -----, *UUD 1945*, (Bandung: Citra Umbara, 2002), h.142

menjadi pelaksana dan penanggungjawab pendidikan adalah keluarga, masyarakat dan pemerintah (pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh aspek masyarakat).

Pemerintah salah satu dari penanggung jawab pendidikan di Indonesia, telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan serta mengeluarkan peraturan-peraturan yang menunjang pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengangkat guru, mengangkat pengawas, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran, dan lain sebagainya.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang bersifat kompleks dan unik, sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala madrasah yang memang merupakan kunci dari perubahan lembaga yang dipimpinnya. Kepala madrasah yang berhasil yaitu apabila ia memahami keberadaan madrasah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin madrasah<sup>4</sup>. Karena nantinya seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw.

أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Hadits di atas menunjukkan bahwa setiap pemimpin terhadap apapun dan kepada siapapun akan selalu diminta pertanggungjawabannya dari segala hasil kepemimpinannya. Demikian pula untuk seorang pemimpin lembaga pendidikan.

---

<sup>4</sup>Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 81

Salah satu keberhasilan kepemimpinan itu sendiri ditentukan dari pengambilan keputusan.<sup>5</sup> Pengambilan keputusan merupakan suatu bagian yang meresap pada sebagian besar aktivitas manajerial. Hampir yang terjadi dalam sebuah kegiatan perusahaan melibatkan pengambilan keputusan atau pengimplementasian keputusan yang telah dibuat.<sup>6</sup> Begitu pula halnya dalam aktivitas di lembaga pendidikan.

Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika pemimpin tidak dapat mengambil keputusan, dia (seharusnya) tidak dapat menjadi pemimpin.<sup>7</sup>

Dapat dikatakan pula bahwa sukses tidaknya seseorang menjalankan peranannya sebagai pemimpin akan sangat tergantung bukan karena keterampilannya melakukan kegiatan-kegiatan operasional, akan tetapi akan dinilai terutama dari kemampuannya mengambil keputusan.

Jika demikian halnya, maka salah satu persyaratan kepemimpinan yang perlu dipenuhi oleh setiap orang yang menduduki jabatan pimpinan ialah keberanian untuk mengambil keputusan yang cepat, tepat, praktis, dan rasional serta memikul

---

<sup>5</sup>M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), cet. ke-5, h. 67

<sup>6</sup>Griffin, *Manajemen; Jilid 1, Edisi 7*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 259

<sup>7</sup>Sondang P. Siagian, *Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), cet 14, h. 83

tanggung jawab atas akibat resiko yang timbul sebagai konsekuensi dari keputusan yang diambilnya.<sup>8</sup>

Sebagaimana Q.S. Ali-Imran Ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ<sup>ط</sup> فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana bentuk kepemimpinan dalam menjalankan tugasnya dalam pengambilan keputusan.

Pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi.<sup>9</sup> Pengambilan keputusan adalah proses identifikasi masalah dan kesempatan kemudian memecahkannya.<sup>10</sup>

Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku, mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil baik atau buruk tidak hanya dinilai dari konsekuensinya terjadi, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya.<sup>11</sup>

Sebagaimana observasi awal yang telah dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan 2 Banjarmasin, telah diketahui bahwa proses pengambilan

<sup>8</sup>Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet ke-8, h. 38.

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 39

<sup>10</sup> Richard L. Daft, *Manajemen: Edisi kelima*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2002), h. 343

<sup>11</sup>Veithzal Rivai, *Education Management: Analisis Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 746-747

keputusan yang diterapkan oleh kepala madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan 2 Banjarmasin lebih sering mengeluarkan kewenangan setelah diskusi. Pasa saat-saat terdesak maka kepala madrasah biasanya melakukan proses pengambilan keputusan dengan kewenangan tanpa diskusi. Adapun untuk proses pengambilan keputusan dengan pendapat ahli belum pernah dilakukan. Dan untuk keputusan dalam kegiatan sehari-hari lebih sering menggunakan kesepakatan.

Adapun gaya yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu gaya analitik dan behavioral, sedangkan gaya pengambilan keputusan konseptual hanya sesekali dilakukan untuk pengambilan keputusan dalam jangka panjang. Sedangkan gaya direktif tidak pernah dilakukan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud ingin meneliti lebih lanjut lagi dengan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: “Model Pengambilan Keputusan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan 2 Banjarmasin”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman sehubungan dengan pengertian judul di atas, penulis memberikan batasan sebagai berikut:

### **1. Model**

Arti model dalam skripsi ini adalah suatu proses dan gaya yang digunakan dalam melakukan sesuatu kegiatan.

## 2. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara alternatif-alternatif tindakan untuk mengatasi masalah, yakni bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu masalah yang meliputi kewenangan tanpa diskusi, pendapat ahli, kewenangan setelah diskusi, dan kesepakatan yang diterapkan. Dan gaya pengambilan keputusan yang meliputi direktif, analitik, konseptual, behavioral. Sedangkan yang dimaksud proses pengambilan keputusan dalam skripsi ini meliputi kewenangan tanpa diskusi, kewenangan setelah diskusi, dan kesepakatan terhadap kenaikan kelas. Dan gaya pengambilan keputusan meliputi analitik, konseptual, dan behavioral terhadap kenaikan kelas.

Jadi yang dimaksud dengan Model pengambilan keputusan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan 2 Banjarmasin yaitu bagaimana proses pengambilan keputusan yang meliputi kewenangan tanpa diskusi, kewenangan setelah diskusi, kesepakatan terhadap kenaikan kelas. Dan bagaimana gaya pengambilan keputusan tersebut yang meliputi analitik, konseptual, behavioral terhadap kenaikan kelas.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Model Pengambilan Keputusan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan 2 Banjarmasin?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi Model Pengambilan Keputusan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan 2 Banjarmasin?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Model Pengambilan Keputusan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan 2 Banjarmasin
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang memengaruhi Model Pengambilan Keputusan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan 2 Banjarmasin

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi upaya pengawasan keilmuan bidang Manajemen Pendidikan, khususnya kepemimpinan.

2. Praktis

- a. Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan 2 Banjarmasin

Sebagai masukan bagi kepala madrasah agar dapat menjalankan salah satu perannya dengan baik, yakni sebagai pengambil keputusan.

b. IAIN Anatasari

Sebagai tambahan referensi di perpustakaan dan sebagai bahan dokumentasi sehingga dapat dijadikan bahan perkembangan dalam pelayanan pendidikan, dan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan judul yang terkait dengan penelitian ini.

c. Peneliti

Sebagai bekal ilmu pengetahuan yang nantinya akan sangat berguna apabila penulis menjadi kepala madrasah dalam sebuah lembaga pendidikan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori berisi tentang pengertian pengambilan keputusan, dasar dalam pengambilan keputusan, etika dalam pengambilan keputusan, model pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan, dan gaya pengambilan keputusan

Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, mengemukakan gambaran umum, lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup, berisi tentang simpulan dan saran. Sedangkan bagian akhir berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran.